



BAPENDA

PERUBAHAN RENJA 2024

BAPENDA MAJALENGKA

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

JL. Raya Cigasong-Jatiwangi Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong

Telp (0233) 8297929 Email: bapendamajalengka@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Anggaran tahun 2024 yang merupakan rencana kerja tahunan.

Perubahan rencana kerja dibuat hampir setiap tahun dengan mendasarkan pada rencana strategis, dan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka sampai dengan bulan Juni 2024 atau di Triwulan II, perubahan rencana kerja disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program, dan kegiatan perubahan tahun 2024.

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan perubahan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2024 dengan baik, namun karena keterbatasan banyak hal, maka kami menyadari bahwa rencana kerja perubahan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Semoga rencana kerja perubahan ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka dan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.



Majalengka, 19 Agustus 2024
Plh. Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Majalengka

RACHMAT GUNANDAR, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19810203 199912 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Perubahan.....	6
BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN	7
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berjalan	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	16
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	24
3.1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Berjalan.....	
B IV PENUTUP	25

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, perangkat daerah berkewajiban menyusun rencana pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan, salah satu dokumen perencanaan pembangunan tersebut adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

Perubahan Renja perangkat Daerah merupakan Dokumen yang secara substansial penerjemahan dari program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2024.

Dokumen Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 disusun sesuai dengan ketentuan pasal 345, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dengan tahapan :

1. Penyusunan Rancangan Perubahan
2. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan
3. Penetapan.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencanan Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) BAB I | 10 Pemerintah Kabupaten Majalengka RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236)Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2008 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2011 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2012 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016

Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

21. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 6).
22. Peraturan Bupati Majalengka No. 70 Tahun 2021 tentang kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Unsur Penunjang perangkat Daerah Di Lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka.
23. Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 94 Tahun 2023 tentang Renstra 2024-2026 Bapenda.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

Menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Majalengka dan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka ke dalam rencana kerja yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun pada tahun 2024.

Menjadi pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2024.

2. Tujuan

Untuk mengarahkan seluruh kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka selama 1 (satu) tahun pada tahun 2024 sehingga sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Untuk dapat mengukur dan mengevaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka selama 1 (satu) tahun pada tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

Bab ini menjelaskan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berjalan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Sumber Dana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berjalan

Badan Pendapatan daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 melaksanakan 2 (dua) Program dengan 8 (delapan) kegiatan yang terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan. Dua Program diantaranya adalah program penunjang yakni Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Sedangkan program utama adalah Program Pengelolaan pendapatan Daerah yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yakni Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Tabel. 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II

Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) Kegiatan (output)	Anggaran 2024	Target 2024	Realisasi Anggaran 2024	Persentase Realisasi Anggaran 2024	Capaian Indikator Tahun 2024	Persentase Capaian Indikator or Kinerja 2024	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA								
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000,00	2 Dokumen	0	0.00	0	0	
5.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.000.000,00	1 Dokumen	0	0.00	0	0	
5.02.01.1.01.03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.000.000,00	1 Dokumen	0	0.00	0	0	
5.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.000.000,00	1 Dokumen	0	0.00	0	0	
5.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	4.000.-000,00	1 Dokumen	0	0.00	0	0	

5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	235.000.000,00	12 Laporan	40.602.191,00	17.28	6	50	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		400.000.000,00						
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	50.000.000,00	1 Unit	0,00	0.00	0	0	
5.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	350.00.00,00	1 Unit	0,00	0.00	0	0	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		810.640.000,00		262.038.430,00	32.32			
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	416.000.000,00	12 Laporan	165.369.530,00	39.75	6	50	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	394.640.000,00	12 Laporan	96.668.900,00	24.50	6	50	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		306.000.000,00						
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	53.400.000,00	23 Unit	0,00	0.00	0	0	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	170.000.000,00	1 Unit	0,00	0.00	0	0	
5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	83.200.000,00	10 Unit	13.050.000,00	15.69	1	10	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		6.757.702.500,00						

CAPAIAN KINERJA S.D TRIWULAN II TAHUN 2024

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Pendapatan Asli Daerah	584.266.775.248,00	228.929.700.680,05	39.18
Hasil Pajak Daerah	184.802.274.949,00	66.026.580.204,00	35.71
Hasil Retribusi Daerah	311.384.007.444,00	124.588.302.867,05	40.01
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.353.516.206,00	6.172.202.627,00	65.99
Lain-lain PAD yang Sah	78.726.976.649,00	32.142.614.982,00	40.83
Belanja Daerah	18.393.897.323,00	4.922.432.084,00	26.91
Belanja Operasi	17.885.144.323,00	4.922.432.084,00	26.91
Belanja Modal	508.753.000,00	0,00	0.00

Alokasi belanja operasi digunakan untuk membiayai 2 (dua) belanja yang ada di lingkungan Badan Pendapatan Daerah yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Penjelasan : Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 alokasi dibagi menjadi 2 (dua) Program dengan 8 (delapan) Kegiatan yang terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) Sub Kegiatan. Dengan total belanja sebesar **Rp 18.393.897.323,00 dengan realisasi Rp.4.922.432.084,00** sebesar **26,91%**. Adapun untuk realisasi pendapatan dari pajak sebesar **Rp 184.802.274.949,00** atau **35.71 %**.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bapenda Kabupaten Majalengka sesuai Peraturan Bupati sesuai Peraturan Bupati Majalengka nomor 43 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Unsur Penunjang Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka sesuai Tugas dan fungsinya dapat dilihat dari target dan realisasi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majalengka. Bapenda Kabupaten Majalengka selain memiliki motivasi untuk meningkatkan kualitas dokumen pengelolaan pendapatan daerah, juga memiliki harapan besar untuk terwujudnya pengelolaan data dan pengelolaan pendapatan daerah yang sangat memungkinkan bukan hanya bermanfaat bagi segenap jajaran para perencana di lingkungan Bapenda Kabupaten Majalengka, namun seluruh stakeholder dalam perencanaan pembangunan.

Selain itu, pentingnya koordinasi baik secara internal Bapenda Kabupaten Majalengka dan dengan berbagai pemangku kepentingan perencanaan pembangunan, sehingga akan berdampak positif bagi pencapaian tujuan pembangunan yang tersurat dalam Rencana Strategis (Renstra) Bapenda Kabupaten Majalengka.

Dalam mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja selama triwulan II tahun 2024, dapat dianalisa salah satunya dari hasil capaian target kinerja. Adapun kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah dilihat dari capaian kinerja tahun 2024 Triwulan II Tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel .2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berjalan
Kabupaten Majalengka

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Prosentase Peningkatan Pendapatan			5	10	5	5	0.45	1,32	5.5	6	
2	Capaian SAKIP SKPD			BB	BB	BB	BB	A	-	BB	BB	
3	Capaian Survey Kepuasan Masyarakat			B	B	B	B	B	-	B	B	
4	Prosentase Operasional Perkantoran			100	100	100	100	94.12	26,91	100	100	

CAPAIAN KINERJA S.D TRIWULAN II TAHUN 2024

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Pendapatan Asli Daerah	584.266.775.248,00	228.929.700.680,05	39.18
Hasil Pajak Daerah	184.802.274.949,00	66.026.580.204,00	35.71
Hasil Retribusi Daerah	311.384.007.444,00	124.588.302.867,05	40.01
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.353.516.206,00	6.172.202.627,00	65.99
Lain-lain PAD yang Sah	78.726.976.649,00	32.142.614.982,00	40.83
Belanja Daerah	18.393.897.323,00	4.922.432.084,00	26.91
Belanja Operasi	17.885.144.323,00	4.922.432.084,00	26.91
Belanja Modal	508.753.000,00	0,00	0.00

Alokasi belanja operasi digunakan untuk membiayai 2 (dua) belanja yang ada di lingkungan Badan Pendapatan Daerah yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Penjelasan : Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 alokasi dibagi menjadi 2 (dua) Program dengan 8 (delapan) Kegiatan yang terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) Sub Kegiatan. Dengan total belanja sebesar **Rp 18.393.897.323,00 dengan realisasi Rp.4.922.432.084,00** sebesar **26,91%**. Adapun untuk realisasi pendapatan dari pajak sebesar **Rp 184.802.274.949,00** atau **35.71 %**.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bapenda Kabupaten Majalengka sesuai Peraturan Bupati sesuai Peraturan Bupati Majalengka nomor 43 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Unsur Penunjang Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka sesuai Tugas dan fungsinya dapat dilihat dari target dan realisasi Anggaran

Berdasarkan tabel di atas pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah selama sampai dengan triwulan II masih rendah.

Realisasi PAD Triwulan II Tahun Lalu Sebesar Rp. 522.458.294.586,61, sementara Realisasi PAD sampai dengan triwulan II Tahun Sekarang sebesar Rp. 529.336.132.216,00. Dilihat dari Realisasi tahun kemarin ada kenaikan sebesar Rp. 6.877.837.629,39 atau sebesar 1.32%. Dari hasil ini dapat disimpulkan capaian kinerja masih rendah atau kecil dibandingkan terhadap target yang akan dicapai selama triwulan II.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pengelolaan pendapatan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tugas dan fungsi Bapenda Kabupaten Majalengka dalam memberikan pelayanan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu prioritas pelayanan terhadap masyarakat beserta lingkungan sekitar merupakan bagian pelayanan yang tidak boleh diabaikan.

Permasalahan-permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta factor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan berdasarkan pada hasil pengisian tabel sebagai berikut :

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Realisasi PAD Belum Mencapai Target	a. Updating Data Belum Periodik	Percepatan Perubahan Updating Data Belum Menyeluruh
		b. Keterbatasan Personil Fungsional Pengelola Pajak	Belum Adanya Diklat Teknis Pengelolaan Pajak
		c. Kurangnya sarana dan prasarana	Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Kurang

membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah untuk unsur penunjang yang melaksanakan fungsi pengelolaan pendapatan daerah meliputi bidang pelayanan dan pendataan, bidang penetapan, bidang penagihan dan pengendalian dan kelompok jabatan fungsional.

Badan Pendapatan Daerah, dalam menyelenggarakan tugas pokok mempunyai fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

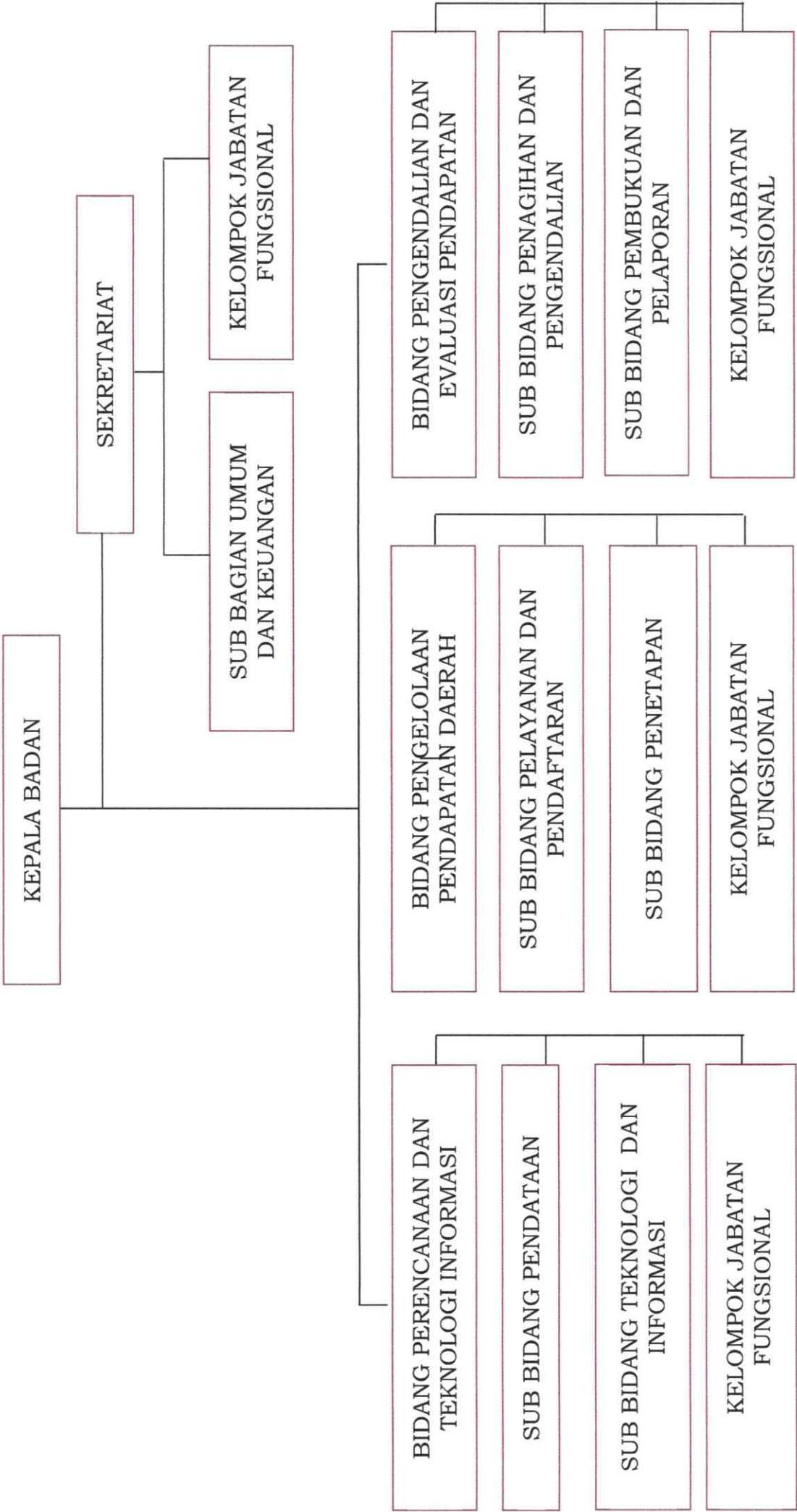
Sementara dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Unsur Penunjang Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka pasal 21 menguraikan bahwa susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahi :
3. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
4. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Perencanaan dan Teknologi Informasi, membawahi :
 - Sub Bidang Pendataan;
 - Sub Bidang Teknologi Informasi; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang-bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, membawahi :
 - Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran;
 - Sub Bidang Penetapan; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional
7. Bidang Penagihan dan Evaluasi pendapatan, membawahi :
 - Sub Bidang Penagihan dan Pengendalian;
 - Sub Bidang pembukuan dan Pelaporan; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

Keterangan	PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR	70 Tahun 2021
TANGGAL	30 Desember 2021
TENTANG	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT, DAN UNSUR PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATENMAJALENGKA

BADAN PENDAPATAN DAERAH



2.4 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah

Sumber daya manusia Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2024 sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari jabatan struktural, pelaksana, jabatan fungsional. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan pada tabel 1 tentang pegawai Bapenda Kabupaten Majalengka berdasarkan jabatan tahun 2024, table 2 tentang pegawai Bapenda kabupaten Majalengka berdasarkan kelompok kerja tahun 2024 dan tabel 3 tentang pegawai Bapenda Kabupaten Majalengka berdasarkan pendidikan tahun 2024.

Tabel 1
Pegawai Bapenda Kabupaten Majalengka
Berdasarkan Jabatan Tahun 2024

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai (Orang)
1	Eselon II (Kepala Badan)	1
2	Eselon III a (Sekretaris Badan)	1
3	Eselon III b (Kepala Bidang)	3
4	Eselon IV (Kepala Sub Bidang/Sub Bagian)	7
5	Jabatan Fungsional	1
6	Pelaksana	16
	Jumlah	29

Tabel 2
Pegawai Bapenda Kabupaten Majalengka
Berdasarkan Kelompok Kerja Tahun 2024

No.	Kelompok Kerja	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala Badan	1	-	1
2	Sekretaris	1	-	1
3	Kepala Bidang	1	2	3
4	Kepala Sub Bidang/Bagian	4	3	7
5	Jabatan Fungsional	-	1	1
6	Fungsional Umum	9	7	16
	Jumlah			29

Tabel 3
Pegawai Bapenda Kabupaten Majalengka
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024

No	Pendidikan	Status Kepegawaian			Total
		PNS	CPNS	PHL	
1	SD	-	-	-	-
2	SMP	-	-	1	1
3	SMA	2	-	18	20
4	D1	-	-	-	-
5	D3	5	-	3	8
6	D4	2	-	-	2
7	S1	16	-	35	51
8	S2	4	-	-	4
9	S3	-	-	-	-
	Jumlah	29	-	57	86

Sumber : Bapenda Tahun 2024

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bapenda Kabupaten Majalengka sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Majalengka yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan daerah, dalam melaksanakan dan upaya meningkatkan pelayanan perlu mengidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bapenda Kabupaten Majalengka berdasarkan isu-isu kewilayahan maupun isu-isu nasional.

Berdasarkan hasil analisis terhadap RPJMD, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Bapenda Kabupaten Majalengka pada tiga tahun mendatang. Maka strategi dan arah pelayanan pengembangan yang dibutuhkan oleh Bapenda Kabupaten Majalengka untuk periode 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Bapenda Kabupaten Majalengka sebagai unit pengelola pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai amanat perundang-undangan dalam pengelolaan pendapatan daerah akan semakin strategis.

1. Meningkatnya proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Peningkatan SDM yang berkualitas sesuai dengan kapasitas dan kompetensi di bidang pendapatan daerah

3. Kualitas psumber daya manusia bidang pendapatan daerah dapat menunjang pelaksanaan kerja dengan baik.
4. Kewenangan dan tanggung jawab yang jelas dan sudah ditetapkan.
5. Penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
6. Sarana dan prasarana yang dimiliki pada saat ini diharapkan dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
7. Kondisi kerja yang kondusif diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
8. Manajemen kerja sudah terbangun antar unit-unit kerja dan pola komunikasi yang lancar secara horizontal maupun vertikal.
9. Akselerasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah / Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pendapatan Daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
10. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pajak dan retribusi ke masyarakat tentang pajak hingga ke kecamatan dan ke desa-desa.
11. Menerapkan Standar Operator Pelayana (SOP) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membayar pajak

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rincian Program Kegiatan Sub Kegiatan Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Berjalan

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka merupakan dokumen rencana tahunan memuat program dan kegiatan yang merupakan penjabaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 – 2026, dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Renstra. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan program dan kegiatan untuk meningkatkan prosentase penerimaan daerah terutama dari pajak daerah.

Dalam mendukung pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan dirumuskan Program dan Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 untuk mendukung terwujudnya capaian kinerja sebagaimana tertuang dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 – 2026. Rencana Program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai Urusan Badan Pendapatan Daerah disampaikan pada tabel 3.1 tentang Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 Badan Pendapatan Kabupaten Majalengka sebagai mana terlampir.

B IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 yang mencakup tujuan, sasaran strategis, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Badan pendapatan daerah kabupaten Majalengka yang disusun dengan berpedoman pada Target Kerja Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2024 sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 akan mampu diimplementasikan secara optimal apabila terjalin kerjasama yang erat dan koordinasi dari berbagai pihak di lingkungan internal dan eksternal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Renstra diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.

Majalengka, Agustus 2024
Plh. Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Majalengka



RACHMAT GUNANDAR, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19810203 199912 1 001

PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2024

Kode	Urusan/		Indikator	Tar	Real	Real	Real	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelo	Prakiraan Maju			Perang																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Bidang Urusan/	Program Kegiatan/	Program/	get	sasi	sasi	Capa	Target 2024	Pagu Indikatif				Lokas	Su	Prioritas		Rencana Tahun 2025	Kat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			Kegiatan/	Akhir	Peri	ode	RPD		RKP	D	Tahu	n			2023	RKP			D	Tahu	n		2022	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023	RKP	D	Tahu	n	2023

[illegible]

5	2	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	2	2	1	1	4.000.00 0	4.000.00 0	2.200.00 0	Majale ngka	DAU		Mening katnya Kualita s dan Kapasit as Tata Kelola Pemerin tahan Daerah	Aparat ur	1	4.000.00 0	Bapen da
5	2	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	2	2	1	1	4.000.00 0	4.000.00 0	4.000.00 0	Majale ngka	DAU		Mening katnya Kualita s dan Kapasit as Tata Kelola Pemerin tahan Daerah	Aparat ur	1	4.000.00 0	Bapen da

5	2	0	1	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	2	2	1	1	4.000.00 0	4.000.00 0	4.000.00 0	Majale ngka	DAU	Mening katnya Kualita s dan Kapasit as Tata Kelola Pemerin tahan Daerah	Aparat ur	1	4.000.00 0	Bapen da
5	2	0	1	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	18	16	4	4	5.000.00 0	5.000.00 0	2.750.00 0	Majale ngka	DAU	Mening katnya Kualita s dan Kapasit as Tata Kelola Pemerin tahan Daerah	Aparat ur	4	4.999.80 0	Bapen da

5	2	0	1	2	00	2.	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	2	2	1	5	5.000.000	5.000.000	5.000.000	2.840.000	Majale ngka	DAU		Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Aparatur	2	4.999.800	Bapenda
5	2	0	1	2	00	2.	02	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu						5.113.008.000	9.231.776.323	9.231.776.323	9.231.776.323	Majale ngka	DAU					8.718.854.100	Bapenda
5	2	0	1	2	00	2.	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	14	27	37	28	5.108.008.000	9.226.776.323	9.226.776.323	9.226.776.323	Majale ngka	DAU		Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Aparatur	29	8.713.854.100	Bapenda

5	2	0	1	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	0	0	1	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Majalah Masyarakat	DAU		Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Aparatur	1	5.000.000	Bapenda
5	2	0	1	2.	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian Tepat Waktu						39.950.000	39.950.000	39.950.000		DAU					53.475.000	Bapenda
							Persentase Pegawai yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi											DAU					

5	2	0	1	00	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	12	Bulan	1	1	1	1	1	37.457.500	37.457.500	37.457.500	Majale ngka	DAU		Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Aparatur	1	41.454.770	Bapenda
5	2	0	1	00	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	12	Bulan	4	3	4	4	4	75.000.000	75.000.000	83.000.000	Majale ngka	DAU		Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Aparatur	5	106.000.000	Bapenda
5	2	0	1	00	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	12	Bulan	1	1	1	1	1	21.430.000	33.930.000	33.930.000	Majale ngka	DAU		Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Aparatur	1	49.998.090	Bapenda

5	2	0	1	0	2.	00	04	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18	12	6	6	4	6	205.731.000	229.731.000	229.891.000	Majale ngka	DAU		Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Aparatur	6	278.062.795	Bapenda
5	2	0	1	0	2.	00	05	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	12	2	2	2	2	91.110.000	91.110.000	91.110.000	Majale ngka	DAU		Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Aparatur	2	91.110.000	Bapenda
5	2	0	1	0	2.	00	06	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	36	12	12	12	12	12	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Majale ngka	DAU		Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Aparatur	12	30.000.000	Bapenda

5	2	0	1	00	00	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	12	12	12	12	12	150.000.000	235.000.000	235.000.000	Majale ngka	DAU		Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Aparatur	12	306.032.555	Bapenda
5	2	0	1	00	00	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik							200.000.000	400.000.000	400.000.000	Majale ngka	DAU					595.000.000	Bapenda
5	2	0	1	00	00	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	12	0	1	1	1	-	50.000.000	50.000.000	Majale ngka	DAU		Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Apatur	1	200.000.000	Bapenda

5	2	0	1	2.	00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	12 Bulan		1	1	200.000.000	350.000.000	350.000.000	Majale ngka	DAU		Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Apartur	2	395.000.000	Bapenda	
5	2	0	1	2.	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang terlayani jasa keamanan dan kebersihan						758.482.650	810.640.000	810.640.000		DAU					815.809.030	Bapenda	
							Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										Majale ngka	DAU						Bapenda

5	2	0	1	2.	00	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	12	36	12	12	436.000.000	416.000.000	416.000.000	Majale ngka	DAU		Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Apartur	12	380.260.380	Bapenda
5	2	0	1	2.	00	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	12	12	12	12	322.482.650	394.640.000	394.640.000	Majale ngka	DAU		Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Apartur	12	435.548.650	Bapenda
5	2	0	1	2.	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik						103.400.000	306.600.000	306.600.000	Majale ngka	DAU					638.850.000	Bapenda

5	2	0	1	0	2.	00	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	12 Bula n	1	1	1	1	23	23	53.400.000	53.400.000	53.400.000	Majale ngska	DAU	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Aparat ur	20	73.000.000	Bapenda
5	2	0	1	0	2.	00	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	3	1 Unit	1	1	1	1	1	1	170.000.000	170.000.000	323.000.000	Majale ngska	DAU	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Aparat ur	3	323.000.000	Bapenda

5	2	0	1	2.	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	20	12 Bulan	25	10	10	50.000.000	83.200.000	83.200.000	Majale angka	DAU	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Aparatur	30	242.850.000	Bapenda
5	2	0	4	0	00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Dokumen Target Pendapatan Asli Daerah yang Akurat						5.834.559.900	6.757.702.500	6.857.702.500	Majale angka	DAU				8.834.292.536	Bapenda
5	2	0	4	2.	01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase data pajak dan retribusi yang akurat						5.834.559.900	6.757.702.500	6.857.702.500		DAU	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			8.834.292.536	Bapenda

	Persentase Dokumen Target Pendapatan Daerah yang akurat																				Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Bapenda
	Persentase Inovasi Pengembangan Pelayanan Pendapatan asli daerah yang Signifikan Terhadap Peningkatan Pendapatan																				Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Bapenda

	Persentase objek temuan hasil pengawasan pajak daerah yang melahirkan rekomendasi perbaikan																								Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		Bapenda
	Persentase objek temuan hasil pengawasan retribusi daerah yang melahirkan rekomendasi perbaikan																								Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		Bapenda
	Persentase pelayanan penerimaan pajak yang sesuai standar																								Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		Bapenda

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5	0	2	0	4	2.	00	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3	12	Bulan	1	1	1	1	129.999.800	229.999.800	229.999.800	Majale angka	DAU	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Wajib Pajak	1	230.592.000	Bapenda
5	2	0	4	0	2.	00	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3	12	Bulan	2	1	1	1	640.693.100	860.077.700	860.077.700	Majale angka	DAU	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Wajib Pajak	1	1.331.392.000	Bapenda
5	2	0	4	0	2.	00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2	12	Bulan	2	1	1	1	303.913.900	380.277.900	430.277.900	Majale angka	DAU	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Internal	2	580.592.000	Bapenda

5	0	2	0	0	00	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3	12 Bulan	1	1	1	2	211.364. 000	264.092. 000	264.092. 000	Majale ngka	DAU	Mening katnya Kualita s dan Kapasit as Tata Kelola Pemerin tahan Daerah	Wajib Pajak	1	253.591. 800	Bapen da
5	0	2	0	0	00	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	243	12 Bulan	1	81	81	81	350.000. 000	500.000. 000	500.000. 000	Majale ngka	DAU	Mening katnya Kualita s dan Kapasit as Tata Kelola Pemerin tahan Daerah	Wajib Pajak	1	500.000. 000	Bapen da

5	0	2	0	4	2.	00	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	243	12 Bulan	60	81	81	252.180.000	252.180.000	252.180.000	Majale ngka	DAU		Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Wajib Pajak	180 000	252.180.000	Bapenda
5	0	2	0	4	2.	00	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3	12 Bulan	3	3	3	583.428.700	563.388.700	563.388.700	Majale ngka	DAU		Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Wajib Pajak	3	563.388.700	Bapenda
5	0	2	0	4	2.	00	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	300	12 Bulan	1200	100	700	636.364.000	746.342.000	746.342.000	Majale ngka	DAU		Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Wajib Pajak	700	1.049.342.000	Bapenda

5	0	2	0	4	0	2.	00	00	10	00	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	300	12	7000	100	700	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Majale ngka	DAU		Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Wajib Pajak	700	100.000.000	Bapenda
5	0	2	0	4	0	2.	00	00	11	00	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	21	12	1	7	1	925.423.000	1.057.243.000	1.302.943.000	Majale ngka	DAU		Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Kecamatan, Kelurahan, Desa, Wajib Pajak	1	2.041.441.330	Bapenda
5	0	2	0	4	0	2.	00	00	13	00	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	3	12	1	1	1	415.143.000	615.143.000	464.443.000	Majale ngka	DAU		Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Kecamatan, Kelurahan, Desa, Wajib Pajak	1	585.143.200	Bapenda

[illegible]